



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMAN BARUS
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 20510

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.110.000.000

1. Tanah Seluas 585 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 940 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 18628 m2 di LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 15000 m2 di KARO, WARISAN Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 350.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CALYA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 402.775.326

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.878.775.326

III. HUTANG Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.878.775.326

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.